



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

UNIT KERJA : KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDI HERDI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 174929

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.180.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m ² /45 m ² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m ² /36 m ² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m ² /36 m ² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m ² /45 m ² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m ² /36 m ² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m ² /70 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	705.000.000
1. MOBIL, HONDA FREED 1.5 E AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2018, HADIAH Rp. 10.000.000		
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	370.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	19.745.268
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	700.738.425
F. HARTA LAINNYA	Rp.	100.000.000



Sub Total	Rp.	5.075.483.693
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.075.483.693

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.